



**Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Istiqamah dalam Pengembangan
Usaha Mikro di Kabupaten Enrekang**

***The Role of Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Istiqamah in the Development
of Micro Enterprises in Enrekang Regency***

Ermin Nur

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

*e-mail: erminnur491@gmail.com

Article submitted: 4/27/2022, revised: 6/10/2023, accepted: 6/15/2023

Abstract:

This study examines the strategic role of Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Istiqamah in efforts to improve the micro-economy in Enrekang Regency and the supporting and inhibiting factors encountered in this effort. This type of research is qualitative, with managerial and Islamic economic approaches. Primary data sources are informants consisting of founders, administrators, members, and customers of BMT Al-Istiqamah, as well as the government of Enrekang Regency. Documents related to research as secondary data. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results showed that BMT Al-Istiqamah contributed to improving microeconomics in Enrekang. The roles played by BMT Al-Istiqamah are the empowerment of human resources and entrepreneurial spirit; improving microeconomic welfare; and preventing the public from practicing usury. Various factors supporting the success of BMT Al-Istiqamah are: strategic locations; the commitment of the founders, administrators, and members; high member savings participation; the high demand for microbusiness actors for BMT Al-Istiqamah; ease of obtaining capital assistance; and government support. The obstacles are the lack of human resources at BMT Al-Istiqamah, the lack of financial capital, the lack of technology utilization, and the number of customers who neglect to make deposit payments.

Keywords: *role, improvment, entrepreneurs, micro economiy*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji peran strategis Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Istiqamah dalam upaya peningkatan ekonomi mikro di Kabupaten Enrekang serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam upaya tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan manajerial dan ekonomi Islam. Sumber data primer adalah informan yang terdiri atas pendiri, pengurus, anggota, dan nasabah BMT Al-Istiqamah, serta pemerintah Kabupaten Enrekang. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Istiqamah turut andil dalam meningkatkan ekonomi mikro di Enrekang. Peran yang dimainkan BMT Al-Istiqamah adalah pemberdayaan sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan; meningkatkan kesejahteraan ekonomi mikro; dan menghindarkan masyarakat dari praktik riba. Ragam faktor pendukung keberhasilan BMT Al-

Istiqamah adalah lokasi yang strategis; komitmen pendiri, pengurus, dan anggota; partisipasi simpanan anggota yang tinggi; tingginya permintaan pelaku usaha mikro terhadap BMT Al-Istiqamah; kemudahan mendapatkan bantuan modal; dan dukungan pemerintah. Hambatannya adalah kurangnya SDM BMT Al-Istiqamah; kurangnya modal finansial; pemanfaatan teknologi; dan banyaknya nasabah yang lalai melakukan pembayaran simpanan.

Kata Kunci: *peran, peningkatan, pelaku usaha, ekonomi mikro*

PENDAHULUAN

Ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah swt. dan hadis Nabi Muhammad saw. yang disampaikan kepada umat manusia adalah mencakup seluruh kehidupan baik hubungan antara makhluk dengan Tuhan-Nya, demikian juga hubungan antara manusia dengan sesamanya serta alam sekitarnya (Harahap & Ghozali, 2020). Ciri utama dalam ideologi Islam adalah tidak menimbulkan konflik dan tidak memisahkan kehidupan spiritual dan material, mencakup seluruh unsur kehidupan baik secara individual maupun sosial (Huda, 2022). Karakter demikian akan membentuk pola-pola yang benar dalam berkehidupan. Ekonomi Islam secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam (Nasution, 2017; Rivai & Buchari, 2009).

Eksistensi ekonomi Syariah sesungguhnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang, karena dengan landasan ini para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain (Amalia, 2009). Selain itu, untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam (Antonio, 2000). Nilai-nilai moral menjadi bagian fundamental dalam kegiatan ekonomi (Soelton et al., 2021).

Ajaran Islam menempatkan keadilan sebagai satu konsep hukum dan sosial. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi (Mursid, 2018). Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

Mencermati fenomena tersebut, ketimpangan ekonomi terjadi di berbagai bidang, yaitu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, sektor dengan sektor, wilayah dengan wilayah, dan negara dengan negara. Fenomena ini akan semakin mengusik rasa ketidakadilan ekonomi bagi kalangan miskin pada umumnya (Edy, 2007).

Jika dicermati lebih jauh, ternyata bertambahnya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bukan karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, tetapi persoalan distribusi yang kurang merata, SDM yang masih kurang, dan rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat (Putra & Isfandayani, 2020). Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat lebih banyak kemiskinan struktural, sehingga upaya untuk mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang realistis seperti pembukaan lapangan kerja, permodalan tanpa bunga dan pengawasan usaha-usaha mikro yang tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat (Melina, 2020; Sahil, 2019).

Dalam doktrin Islam dijelaskan bahwa hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan alokasi sumber daya potensi bagi masyarakat (Amalia, 2009). Hal ini telah terangkum dalam beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk mendistribusikan sebagian harta seseorang dan untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umat serta dapat diproduktifkan. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah BMT (Baitul Mal wat Tamwil) (Ascarya et al., 2018; Imaniyati & Bakti, 2010).

Dari sisi lain BMT dalam melakukan kegiatan ekonomi dan berinteraksi dengan masyarakat banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum melangkah. Salah satu di antaranya BMT mesti memperhatikan kultur dan potensi masyarakat agar dapat mendampingi masyarakat dengan baik, seperti yang dilakukan oleh BMT yang masih eksis sampai saat ini (Sudjana & Rizkison, 2020; Dawami et al., 2021).

Koperasi Syariah BMT Al-Istiqamah merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan pada tahun 2002 di Kabupaten Enrekang. BMT tersebut telah banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor usaha mikro di Kabupaten Enrekang. Dari perkembangan BMT tersebut membuat peneliti tertarik meneliti lebih jauh tentang peran BMT dalam meningkatkan usaha mikro di Kabupaten Enrekang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan ekonomi syariah dan manajerial. Pendekatan ekonomi syariah digunakan untuk membantu peneliti mengetahui dan memahami peran yang dilakukan oleh BMT Al-Istiqamah dalam meningkatkan kesejahteraan yang bebas dari praktik riba, sehingga ekonomi mikro dapat berkembang. Sedangkan pendekatan manajerial digunakan untuk membantu peneliti dalam mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan BMT Al-Istiqamah terhadap peningkatan pembiayaan di sektor usaha mikro.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yakni data empiris yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara di lapangan yang bersumber dari informan maupun data yang telah diperoleh pada BMT Al-Istiqamah yang terdiri atas pengelola mulai dari manager, pemerintah dan nasabah BMT Al-Istiqamah, dan data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan (Subagiyo, 2017; Nata, 2004).

Lokasi penelitian ditetapkan pada dua tempat yang berbeda. *Pertama*, dilaksanakan di kantor BMT Al-Istiqamah yang terletak di Jalan Industri No. 12 Enrekang. *Kedua*, dilaksanakan di Pasar Sentral Enrekang karena umumnya anggota dan nasabah BMT Al-Istiqamah beraktivitas di pasar sentral Enrekang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Observasi dilakukan untuk mengetahui dan mengeksplorasi semua kegiatan yang dilakukan oleh BMT Al-Istiqamah dalam melaksanakan peranannya sebagai penggerak ekonomi mikro di daerah dan pelaku usaha mikro yang dibina oleh BMT Al-Istiqamah di pasar sentral Enrekang. (2) Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan

mengeksplorasi lebih dalam terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh BMT Al-Istiqamah. Informan terdiri atas manajerial, pemerintah, dan nasabah/pengguna jasa BMT Al-Istiqamah. Dokumentasi terhadap profil BMT Al-Istiqamah, buku, dan jurnal relevan sebagai landasan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran BMT Al-Istiqamah terhadap Peningkatan Ekonomi Mikro

Berdasarkan hasil observasi pada kantor BMT Al-Istiqamah dan pasar Sentral Enrekang dan wawancara kepada pengurus dan pelaku usaha mikro di kabupaten Enrekang selama dua bulan peneliti menemukan tiga peran strategis yang dilakukan oleh BMT Al-Istiqamah, yaitu peran pembinaan SDM dan jiwa kewirausahaan, peran meningkatkan kesejahteraan ekonomi mikro, peran peningkatan sumber daya manusia, dan peran menjauhkan masyarakat dari praktik riba. Ketiga peran tersebut, peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan SDM dan Jiwa Kewirausahaan

Salah satu peran strategis yang dijalankan oleh BMT Al-Istiqamah adalah Pengembangan sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan para pengusaha pemula yang ada di pasar sentral Enrekang kemudian dilakukan pelatihan pengembangan usaha kecil dan menengah. Selain itu, BMT Al-Istiqamah juga melakukan pendampingan usaha selama satu tahun melalui pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan serta motivasi kepada seluruh anggota dan nasabah secara khusus.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro

Kebudayaan BMT Al-Istiqamah di kabupaten Enrekang memiliki membawa energy positif terhadap pengembangan ekonomi mikro di Enrekang khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah di pasar sentral Enrekang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap para penjual usaha mikro di pasar sentral Enrekang, peneliti menemukan bahwa jumlah permintaan tambahan modal usaha nasabah BMT Al-Istiqamah selalu mengalami peningkatan lima tahun terakhir. Peningkatan permintaan jumlah tambahan modal dan jenis usaha mikro tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Nilai Permintaan Modal Usaha Pelaku Usaha Mikro

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Permintaan (%)					Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Amirah	Beras	6 Juta	6 Juta	10 Juta	15 Juta	20 Juta	57 Juta
2	Muh. Ridwan	Pakan Ayam	-	-	4 Juta	6 Juta	7 Juta	17 Juta
3	Haeruddin	Obat	2 Juta	2 Juta	4 Juta	5 Juta	6 Juta	19 Juta
4	Hj. Tati	Penjahit Pakaian	2 Juta	2 Juta	4 Juta	5 Juta	6 Juta	19 Juta
5	Amran	Campuran	4 Juta	3 Juta	4 Juta	5 Juta	6 Juta	22 Juta
6	Aswil	Arloji	2 Juta	2 Juta	4 Juta	5 Juta	6 Juta	19 Juta

7	Rasna	Mie Ayam	3 Juta	3 Juta	4 Juta	5 Juta	6 Juta	21 Juta
8	Ahmad	Penjahit Sepatu	2 Juta	2 Juta	2 Juta	3 Juta	4 Juta	13 Juta
9	Nasirah	Minyak	3 Juta	3 Juta	3 Juta	4 Juta	5 Juta	18 Juta
10	Sarma	Makanan	2 Juta	2 Juta	3 Juta	3 Juta	5 Juta	15 Juta
Total			26 Juta	25 Juta	42 Juta	56 Juta	71 Juta	220 Juta

Sumber: Kantor BMT Al-Istiqamah Enrekang Periode 2015-2019

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut di atas diketahui bahwa total permintaan pada tahun 2015 mencapai Rp 26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah). Pada tahun 2016 total permintaan hanya mencapai Rp 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 total permintaan mencapai Rp 42,000,000,- (empat puluh dua juta rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp 17,000,000,- (tujuh belas juta rupiah). Pada tahun 2018 total permintaan mencapai Rp 56,000,000,- (lima puluh enam juta rupiah) terus mengalami kenaikan sebesar Rp 14,000,000,- (empat belas juta rupiah). Dan pada tahun 2019 total permintaan mencapai Rp 71,000,000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) terus mengalami peningkatan sebesar Rp 15,000,000,- (lima belas juta rupiah). Secara keseluruhan mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015 tidak ada peningkatan permintaan dari nasabah bahkan untuk jenis usaha barang campuran mengalami penurunan karena pada tahun 2016 jumlah omzet BMT Al-Istiqamah mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya anggota BMT Al-Istiqamah yang menarik simpanannya dengan alasan pindah tugas dan adanya keperluan mendesak (Tabi, 2019). Mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 pengurus BMT Al-Istiqamah melakukan pembenahan internal sehingga menimbulkan komitmen untuk bangkit. Hal tersebut ditandai meningkatnya kembali jumlah permintaan dari nasabah.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Nasabah Pelaku Usaha Mikro

No	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah Usaha Mikro				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Beras	1	1	2	2	3
2	Pakan Ayam	1	1	2	2	3
3	Obat	1	1	2	2	2
4	Penjahit Pakaian	1	1	1	2	2
5	Campuran	1	1	3	4	4
6	Arloji	1	1	1	2	2
7	Mie Ayam	1	1	2	2	3
8	Penjahit Sepatu	1	1	2	2	3
9	Minyak	1	1	1	1	2
10	Makanan	1	1	2	3	5
Total		10	10	17	22	29

Sumber: Kantor BMT Al-Istiqamah Periode 2015-2019

Berdasarkan data pada Tabel 2 tersebut di atas diketahui bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah nasabah hanya 10 jenis usaha. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 7 jenis usaha sehingga mencapai 17 jenis usaha. Pada tahun 2018 jumlah jenis usaha mencapai 22 jenis usaha atau mengalami peningkatan sebanyak 5 jenis usaha. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga mencapai 29 jenis usaha atau mengalami

peningkatan sebanyak 7 jenis usaha. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan jumlah nasabah dari tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh orang pelaku usaha mikro, pada prinsipnya mereka sangat berharap agar BMT Al-Istiqamah bisa memberi bantuan tambahan modal usaha lebih besar agar perputaran usaha mereka dapat berkembang dengan cepat.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Omzet Penjualan Nasabah Pelaku Usaha Mikro

No	Jenis Usaha	Jumlah Omzet Nasabah Usaha Mikro				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penjual Beras	100 Juta	150 Juta	200 Juta	250 Juta	300 Juta
2	Penjual Pakan Ayam	-	-	50 Juta	60 Juta	110 Juta
3	Penjual Obat	52 Juta	63 Juta	76 Juta	90 Juta	104 Juta
4	Penjahit Pakaian	75 Juta	87 Juta	100 juta	113 Juta	127 Juta
5	Penjual Campuran	85 Juta	97 Juta	110 Juta	123 Juta	137 Juta
6	Penjual Arloji	65 Juta	77 Juta	90 Juta	103 juta	118 Juta
7	Penjual Mie Ayam	50 juta	62 juta	75 Juta	88 Juta	100 Juta
8	Penjahit dan Penjual Sepatu	60 Juta	73 Juta	86 Juta	100 Juta	113 Juta
9	Penjual Minyak	80 Juta	92 Juta	105 Juta	117 Juta	130 Juta
10	Penjual Makanan	50 Juta	62 Juta	75 Juta	88 Juta	100 Juta
Total		617 Juta	763 Juta	857 Juta	1,132 M	1,339 M

Sumber: Hasil Wawancara Tanggal 24 November 2019

Berdasarkan data pada tabel 3 tersebut di atas diketahui bahwa semua nasabah BMT Al-Istiqamah mengalami peningkatan omzet selama lima tahun terakhir. Peningkatan omzet oleh para pelaku usaha mikro cukup bervariasi, yaitu antara Rp 11,000,000,- (sebelas juta rupiah) sampai Rp 15,000,000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak delapan jenis pelaku usaha mikro, dan peningkatan antara Rp 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua jenis pelaku usaha. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan jumlah nasabah dari tahun 2015 sampai 2019.

3. Menjauhkan Masyarakat dari Praktik Riba

Salah satu peran strategis yang dilaksanakan oleh pengurus BMT Al-Istiqamah Enrekang adalah sosialisasi pemberdayaan ekonomi syariah. Salah satu misinya adalah memberi pencerahan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro untuk menghindari praktik riba.

Faktor Pendukung dan Penghambat BMT Al-Istiqamah

1. Faktor Pendukung

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Istiqamah berdiri sejak tahun 1995. Dalam kurun waktu 24 tahun keberadaannya di kabupaten Enrekang merupakan prestasi yang perlu dibanggakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus dan Nasabah pelaku usaha mikro diketahui bahwa terdapat dua faktor pendukung yang berpengaruh terhadap BMT Al-Istiqamah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Tabi, 2019; Hamriah, 2019).

a. Faktor Internal

Secara internal BMT Al-Istiqamah eksistensi keberadaannya di kabupaten Enrekang karena didukung oleh tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah lokasi strategis, komitmen para Dewan Pendiri dan Pengurus, dan tingginya partisipasi simpanan anggota.

1) Lokasi Strategis

Berdasarkan hasil observasi peneliti, salah satu kelebihan BMT Al-Istiqamah adalah karena ia terletak di jantung kota kabupaten Enrekang. Saat ini BMT Al-Istiqamah berkantor di jalan Industri No. 26 Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sekitar 200 meter dari pasar sentral Enrekang. Selain itu, Ketua BMT Al-Istiqamah juga termasuk salah seorang pedagang pakaian yang menjalankan usahanya di dalam pasar. Kedua hal tersebut dapat memudahkan komunikasi, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh anggota dan nasabah pelaku usaha mikro di pasar. Lokasi yang sangat strategis inilah menjadi salah satu penyebab berkembangnya BMT Al-Istiqamah dan meningkatkan ekonomi mikro di Enrekang.

2) Komitmen para Pengurus BMT Al-Istiqamah

Komitmen merupakan kekuatan dahsyat bagi kelangsungan suatu organisasi. Sebuah organisasi atau lembaga yang kuat sangat ditopang oleh komitmen para pengurusnya dalam membangun dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Komitmen yang begitu besar dari para Pengurus dan Nasabah BMT Al-Istiqamah menjadikan lembaga ini masih bertahan sampai saat ini.

3) Tingginya Partisipasi Simpanan Anggota

Pada tahun 2016 omzet yang dikelola oleh BMT Al-Istiqamah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meskipun mengalami penurunan tetapi para pengurus terus menerus melakukan evaluasi dan selalu mengajak para anggota dan nasabah untuk meningkatkan jumlah simpanan. Usaha yang maksimal tersebut membuahkan hasil yang positif sehingga pada tahun 2017, 2018, dan 2019 terus mengalami kenaikan. Perkembangan yang sangat positif tersebut diyakini akan terus mengalami kenaikan seiring dengan tingginya partisipasi anggota dan nasabah membangun ekonomi mikro di kabupaten Enrekang.

b. Faktor Eksternal

Secara eksternal BMT Al-Istiqamah eksistensi keberadaannya di kabupaten Enrekang karena didukung oleh tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah tingginya harapan para pelaku usaha mikro kepada BMT Al-Istiqamah, kemudahan mendapatkan bantuan modal, dan dukungan pemerintah.

1) Tingginya Permintaan para Pelaku Usaha Mikro kepada BMT Al-Istiqamah

Keberadaan BMT Al-Istiqamah menjadi energi sekaligus harapan bagi para pelaku usaha mikro di Enrekang dalam meningkatkan usahanya. Harapan berupa tersedianya dana yang cukup sesuai dengan keperluan usaha mereka.

2) Kemudahan Mendapatkan Bantuan Modal Usaha

Salah satu jenis pelayanan pengurus BMT Al-Istiqamah terhadap para anggota dan nasabahnya adalah kemudahan mendapatkan bantuan modal usaha. Untuk mendapatkan bantuan tidak perlu bersusahpayah mengantri dan menyediakan beberapa dokumen seperti halnya dipersyaratkan oleh lembaga lain seperti bank dan koperasi non syariah.

3) Dukungan Pemerintah Daerah

Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang rutin dilaksanakan oleh BMT Al-Istiqamah mendapat dukungan moril dari pemerintah daerah kabupaten Enrekang. Dukungan pemerintah tersebut disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Enrekang setiap pengurus BMT Al-Istiqamah menyampaikan laporan tahunannya. Pihak pemda berharap agar BMT Al-Istiqamah tetap eksis karena keberadaannya cukup membantu pengusaha mikro di Enrekang dan pada saat yang sama ekonomi mikro Enrekang turut mengalami peningkatan yang signifikan.

1. Faktor Penghambat

Meskipun keberadaan BMT Al-Istiqamah mendapat respon positif dari para pelaku usaha mikro di Enrekang, tetapi bukan berarti bahwa BMT Al-Istiqamah bebas dari masalah. Faktor penghambat tersebut ada yang bersifat internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Secara internal BMT Al-Istiqamah meskipun tetap eksistensi di kabupaten Enrekang tetapi bukan berarti tidak menghadapi hambatan. Secara umum, terdapat tiga faktor internal yang menjadi penghambat pengelolaan BMT Al-Istiqamah. Keempat faktor tersebut adalah kurangnya SDM yang dimiliki oleh BMT Al-Istiqamah, kurangnya modal financial yang dikelola oleh BMT Al-Istiqamah, dan masalah teknologi.

1) Kurangnya SDM BMT Al-Istiqamah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu penentu keberhasilan dan kesuksesan sebuah lembaga atau perusahaan. Meskipun BMT Al-Istiqamah termasuk berhasil meningkatkan usaha dan ekonomi mikro di kabupaten Enrekang, tapi masalah SDM juga menjadi salah penghambat secara internal. Salah satu hambatan yang dialami oleh BMT Al-Istiqamah adalah masih kurangnya modal financial sementara permintaan nasabah semakin bertambah. Untuk memenuhi permintaan nasabah, pihak pengurus melakukan kerjasama dengan koperasi lain.

2) Teknologi

Salah satu ciri abad ke-21 adalah maju pesatnya teknologi dalam berbagai aspek. Orang yang tidak menguasai teknologi dianggap buta literasi abad ke-21. Salah satu hambatan serius yang dihadapi oleh pengurus BMT Al-Istiqamah adalah teknologi.

b. Faktor Eksternal

Secara eksternal BMT Al-Istiqamah meskipun tetap eksistensi di kabupaten Enrekang tetapi bukan berarti tidak menghadapi hambatan. Secara eksternal salah satu hambatan yang dialami oleh BMT Al-Istiqamah adalah adanya anggota/nasabah yang malas

membayar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya anggota/nasabah yang malas membayar iuran/simpanan di antaranya; sibuk mengurus usaha yang dikelolanya, kurangnya daya beli jenis barang yang dijual dan terbatasnya tenaga atau karyawan untuk menagih semua anggota dan nasabah. Meskipun tidak terlalu signifikan pengaruhnya, tetapi kalau berlanjut terus pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada kelangsungan BMT Al-Istiqamah.

Pembahasan

Peran BMT Al-Istiqamah Bagi Peningkatan Ekonomi Mikro

1. Pengembangan SDM dan Jiwa Kewirausahaan

Salah satu penyebab keberhasilan BMT Al-Istiqamah dalam meningkatkan ekonomi mikro di kabupaten Enrekang adalah para pengurus BMT Al-Istiqamah mampu memberdayakan potensi yang dimiliki dalam membangun SDM dan jiwa kewirausahaan para nasabahnya (Prastiawati & Darma, 2016). Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan determinisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar. Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan (Ari, 2019).

Konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik (Rusby & Hamzah, 2013). Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Pemahaman yang jernih mengenai ini, diharapkan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Berikut adalah salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal (Putra & Isfandayani, 2020).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya terpadu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang dengan perkembangan raga dan jiwanya. Dalam hal ini, keluarga sebagai wahana pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai peran yang penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bersifat matra ganda dan lintas sektoral sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai bidang pembangunan (Rahayu, 2020). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan proses interaksi yang dinamik antara pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial budaya dan politik, perkembangan iptek, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, hukum, serta berbagai bidang pembangunan lainnya (Dawami et al., 2021).

Faktor manusia, dengan potensi keahliannya yang menyatu dengan iptek, merupakan penggerak dan memegang peran utama yang menentukan bagi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan yang bertumpu pada

sumber daya manusia yang berkualitas akhirnya membawa bangsa bergerak ke taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Harapan seperti itu sangat memerlukan adanya mekanisme yang sistematis, serta adanya kelembagaan yang mendukung, dan program yang lebih terarah. Karena luasnya dimensi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganannya secara lebih menyeluruh makin diperlukan (Rusby & Hamzah, 2013).

Proses suatu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah locus of control, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil resiko dan factor usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, model peran, pesaing, investor dan kebijaksanaan pemerintah (Prastiawati & Darma, 2016).

Wirausaha yang sukses mampu menghasilkan gagasan baru untuk memanfaatkan peluang serta menyikapi masalah yang dihadapi, kemudian menjadi hal itu sebagai usaha yang berhasil. Hampir selalu ada kejadian pemicu yang melahirkan ide/usaha baru. Mungkin wirausahawan tersebut tidak mempunyai prospek karier yang lebih baik lagi atau merupakan pilihan karier yang disengaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memasuki karier kewirausahaan. Kebanyakan dibentuk oleh sifat dan lingkungan pribadi (Austhi, 2017).

Seorang wirausaha memiliki yang lebih tinggi dari nonwirausaha yang berarti bahwa mereka memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk mengendalikan takdir mereka sendiri. Untuk itu menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha (Rifa'i et al., 2019).

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*opportunity*), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (*risk bearing*) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya (Suryana, 2003).

Menurut Suryana (2003), kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berfikir kreatif dan inovatif. Pengembangan jiwa wirausaha agar kreatif dan inovatif harus didukung dengan dana yang memadai dan kepercayaan dari segala pihak. Dengan adanya program pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BMT Al-Istiqamah, maka diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menjadi pebisnis karena program BMT Al-Istiqamah mengadakan pelatihan-pelatihan bisa mengurangi pengangguran

apabila nasabah yang telah mengikuti seminar tersebut lebih mengembangkan usahanya dan masyarakat yang belum menjadi pengusaha agar memiliki minat menjadi pebisnis.

Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat. Perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan usaha yang baik, maka akan semakin meningkatkan kinerja masyarakat (Adnan & Ajija, 2015).

Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap hari mengharuskan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Menciptakan lapangan pekerjaan adalah salah satu cara peningkatan sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) usaha mikro kecil memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh guna meningkatkan kinerja ekonominya (Wulandari & Kassim, 2016). Kinerja ini dapat meningkat jika aktor usaha mikro kecil atau usaha kecil selaku pemilik dan pengelola usaha memiliki keterampilan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan secara simultan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penekanan pada pembudayaan jiwa kewirausahaan melalui pendekatan *learning by doing* (Wulandari, 2019).

2. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha tersebut agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang atau jasa (Austhi, 2017). Besarnya pendapatan dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan usaha tersebut meningkat yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Selain itu, bertambahnya tenaga kerja menunjukkan bahwa permintaan pelanggan terhadap barang yang dijual adalah tinggi, sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi keinginan pelanggan (Rifa'i et al., 2019).

Peningkatan kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat terpenuhi standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosial (Prastiawati & Darma, 2016). Melalui pembiayaan yang diberikan, anggota dapat mengembangkan usahanya. Dari usaha yang berkembang secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan anggota. Apabila pendapatan usaha anggota meningkat maka kesejahteraan anggota terus meningkat. Indikator kesejahteraan anggota dilihat dari kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi (Lisa, 2016). Apabila indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera.

Pengaruh Pembiayaan BMT terhadap persepsi anggota BMT tentang perkembangan usaha untuk mengatasi kekurangan modal pelaku usaha mikro dan kecil adalah dengan melakukan pembiayaan BMT. Pembiayaan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan usaha mikro dan kecil. Perkembangan usaha diukur dengan indikator meningkatnya jumlah pendapatan, laba, barang yang dijual, dan lainnya selama jangka waktu tertentu (Prastiawati & Darna, 2016). Pembiayaan BMT diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan modal para pelaku usaha mikro dan kecil dan dapat menjadi sumber tambahan modal. Sehingga semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan maka persepsi perkembangan usaha semakin meningkat .

Pemberian kredit berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Jenis bantuan dalam bentuk pembiayaan BMT tentu memberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha pasar tradisional. Peningkatan kesejahteraan diukur dengan dimensi-dimensi tertentu, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tambahan, dan lainnya. Sedangkan perkembangan usaha diukur dari pendapatan, laba, penjualan, dan lainnya selama jangka waktu tertentu (Rifa'i et al., 2019). Berdasarkan uraian tersebut maka semakin berkembangnya usaha maka penghasilan yang dihasilkan juga naik sehingga kesejahteraan anggota akan meningkat.

3. Menjauhkan Masyarakat dari Praktik Riba

Pada era modern ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat namun peningkatan kebutuhan ini tidak diiringi oleh meningkatnya pendapatan. Dengan adanya fenomena tersebut, mendorong manusia untuk melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhannya yang semakin lama semakin berkembang. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap dana atau modal, membuat masyarakat harus berhubungan dengan lembaga keuangan seperti Bank (Ari, 2019).

Namun di sisi lain, para pelaku usaha kecil memiliki kendala permodalan. Para pelaku usaha kecil tidak mendapatkan akses pembiayaan di dunia perbankan, karena akses untuk mendapatkan pembiayaan ke dunia perbankan relatif sulit diberikan untuk para pelaku usaha kecil. Hal ini terjadi karena Bank Syariah masih mensyaratkan adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan, yang itu tidak mungkin dipenuhi oleh para pelaku usaha kecil. Selain itu, persyaratan administratif pada saat melakukan pembiayaan seperti laporan keuangan dan lainnya masih relatif sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha kecil (Lisa, 2016). Sedangkan pada waktu yang bersamaan para pelaku usaha kecil ini sangat membutuhkan pembiayaan untuk mencapai keinginan mereka dalam melancarkan usaha. Karena sulitnya akses untuk mendapatkan pembiayaan, tidak sedikit dari para pelaku usaha kecil berhubungan dengan rentenir.

Praktik rentenir seperti ini sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam karena praktik ini mengandung unsur riba nasi'ah. Di mana riba nasi'ah ini riba yang muncul akibat hutang piutang. Riba nasi'ah ini mengandung sifat pemerasan terhadap golongan ekonomi lemah. Sehingga praktik ini jelas harus dihapuskan di kalangan masyarakat karena akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan bagi masyarakat (Mursid, 2018).

Munculnya lembaga keuangan BMT ini untuk memberikan alternatif kepada masyarakat kalangan bawah dalam mendapatkan pembiayaan dengan kewajiban pengembalian yang cukup ringan. Sehingga masyarakat tidak harus meminjam kepada rentenir lagi. Dengan adanya peran BMT dalam memberikan pembiayaan dengan akses yang mudah ini diharapkan bisa menghapuskan praktik rentenir di masyarakat (Nourma, 2017). Namun kenyataannya, rentenir masih tetap diminati oleh para pelaku usaha kecil hingga saat ini.

Dang et al., (2015) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat (Muhammad, 2009).

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan ekonomi mikro di sebuah lembaga keuangan. Salah satu antaranya adalah karena lokasi yang sangat strategis. Sebesar dan sebaik apapun yang dimiliki oleh sebuah perusahaan kalau terletak di daerah yang tidak strategis pasti mengalami kondisi yang tidak menguntungkan lembaga atau instansi tersebut.

Selain itu, faktor komitmen para pengurus untuk memajukan BMT Al-Istiqamah menjadi modal besar. Kebanyakan sebuah perusahaan atau lembaga keuangan mengalami kerugian salah satu penyebabnya adalah rendahnya komitmen dari pengurusnya untuk membesarkan perusahaan atau lembaganya. Hal ini dibuktikan masih tetap eksisnya BMT Al-Istiqamah di kabupaten Enrekang.

Faktor lain yang menjadi kelebihan BMT Al-Istiqamah adalah tingginya partisipasi simpanan anggotanya. Salah satu penyebabnya adalah para nasabah meyakini bahwa para pengurus BMT Al-Istiqamah dipercaya dan amanah sesuai visi dan misinya sebagai lembaga keuangan nonbank berbasis syariah.

Tingginya permintaan para pelaku usaha mikro kepada BMT Al-Istiqamah juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan BMT Al-Istiqamah dalam meningkatkan ekonomi mikro di kabupaten Enrekang. Menurut Hasyim (2017), terdapat tiga hal yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu tingginya penawaran, tingginya permintaan, dan faktor nonekonomi.

Kemudahan mendapatkan modal usaha di BMT Al-Istiqamah menjadi daya Tarik tersendiri bagi para pelaku usaha mikro di kalangan para pelaku usaha mikro di pasar sentral Enrekang. Untuk mendapatkan bantuan modal tambahan usaha, para pelaku usaha mikro tidak dipersyaratkan seperti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak perbankan. Selain itu, keberadaan BMT Al-Istiqamah di kabupaten Enrekang mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Bentuk dukungan pemerintah adalah

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih

membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama.

Usaha penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat (Adnan & Ajija, 2015). Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, di mana yang besar hanya berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, maka efisiensi terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak diberdayakan (Wulandari & Kassim, 2016).

Penguasaan faktor produksi dari banyak program pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan, hampir tidak ada yang mencoba memasuki aspek yang cukup fundamental, yaitu aspek penguasaan faktor-faktor produksi oleh rakyat. Kalaupun ada umumnya pada faktor produksi modal. Untuk faktor produksi lahan (lahan pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan) masih belum disentuh. Kelangkaan atau ketidakberanian menyentuh aspek ini, barangkali disebabkan kandungan politik yang cukup tinggi. Apapun alasannya, aspek ini perlu mendapat perhatian dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebab pada dasarnya penguatan ekonomi rakyat adalah penguatan pemilikan (spesifikasi hak) atas faktor-faktor produksi. Tanpa memasuki aspek ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat, hanya menyentuh permukaannya saja (Sahil, 2019).

Penguatan SDM Hampir pada setiap program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia dijadikan salah satu komponennya. Tetapi juga hampir di semua program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia ini hanya dilakukan ala kadarnya. Tidak ada usaha sistematis dan rencana strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat.

Spesifik lokasi dan permasalahan karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya bersifat spesifik, baik dari aspek lokasi maupun dari aspek permasalahan, maka tidak mungkin didesain program pemberdayaan yang bersifat generik. Realitanya, hampir

semua program pemberdayaan ekonomi rakyat, didesain generik. Kesalahan yang paling fatal, yang selama ini dilakukan adalah, adanya anggapan bahwa permasalahan mendasar masyarakat tunadaya adalah permasalahan modal, oleh sebab itu setiap program pemberdayaan selalu ada komponen bantuan modal bergulir. Padahal anggapan itu tidak selalu benar. Akibatnya, banyak program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang hasilnya tidak menyentuh permasalahan pokoknya.

2. Faktor Penghambat

Banyak faktor yang menjadi penghambat perkembangan BMT secara umum, dan BMT Al-Istiqamah secara khusus. Salah satu di antaranya adalah kurangnya SDM yang dimiliki oleh pihak BMT Al-Istiqamah. Kekurangan SDM dapat menjadi pemicu lambannya pergerakan roda organisasi. Kondisi riil menunjukkan bahwa pihak BMT Al-Istiqamah hanya mempekerjakan dua orang pegawai untuk mengurus administrasi dan pembiayaan. Inilah yang menjadi salah satu sebab lambannya perkembangan dan pertumbuhan modal usaha yang dimiliki oleh BMT Al-Istiqamah.

Selain itu, kendala atau penghambat yang dialami oleh BMT Al-Istiqamah adalah kurangnya modal finansial. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi risiko dengan borrowers, memberikan informasi kepada borrower, dan menyediakan likuiditas.

Seperti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah/gaji, pada Server/lander umumnya masyarakat yang tunadaya hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (*need achievement* rendah, tidak disiplin). Rendahnya keterampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tuna daya, adalah melalui *affirmative action* (misalnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tuna daya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan *affirmative action* bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah dan pihak swasta harus memiliki modal yang cukup.

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi

masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat.

Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, salah satu langkah yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalau pun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, dapat mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis. Dengan demikian peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan pasar yang efisien (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2018).

Faktor lain yang mempengaruhi lambannya perkembangan BMT Al-Istiqamah adalah teknologi. Perlu diketahui bahwa perubahan kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam berbagai pertimbangan bisnis. Bagaimanapun, sebuah perusahaan dituntut untuk selalu siap menghadapi perubahan jika ingin tetap eksis di dunia bisnis. Ini dikarenakan tuntutan pasar yang juga berubah dari waktu ke waktu seiring berubahnya

kondisi lingkungan. Sehingga tak heran bila kemampuan adaptasi terhadap perubahan menjadi salah satu aspek krusial dalam perkembangan sebuah perusahaan.

Salah satu perubahan kondisi lingkungan yang dinamikanya paling cepat adalah teknologi. Tak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan teknologi bisa saja terjadi di setiap menit setiap harinya. Penemuan-penemuan serta inovasi-inovasi baru tak henti-hentinya mewarnai segala aspek kehidupan tak hanya di negara maju, namun juga di negara-negara berkembang sekalipun, tak terkecuali Indonesia.

Semua perusahaan kini dituntut untuk memenuhi standar teknologi yang berlaku secara informal di tengah-tengah masyarakat. Tak ada acuan mengenai hal ini, namun kemajuan teknologi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudahan serta kualitas yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi menjadi nilai plus di mata masyarakat. Salah satu contoh mudah adalah perusahaan transportasi yang kini beramai-ramai memberlakukan pemesanan tiket on-line. Pelayanan-pelayanan semacam ini amat mempengaruhi minat pasar yang pada akhirnya mempengaruhi omset perusahaan. Pengaruh teknologi yang amat besar dan dirasakan amat penting bagi dunia bisnis ini dielaborasi secara lebih spesifik pada bab-bab selanjutnya.

Dan banyaknya nasabah yang malas melakukan pembayaran pinjaman modal. Modal utama pengembangan BMT adalah simpanan anggota dan nasabah. Keterlambatan pembayaran simpanan anggota dan nasabah pasti mempengaruhi pertumbuhan perusahaan/lembaga/organisasi, termasuk di dalamnya BMT Al-Istiqamah. Untuk mengatasi masalah ini pihak BMT perlu terus menerus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, kehadiran BMT Al-Istiqamah yang berdiri sejak tahun 1995 memberi energi positif terhadap pertumbuhan dan peningkatan perekonomian di Kabupaten Enrekang. Berbagai perannya terhadap pelaku usaha mikro, antara lain: (1) Mengembangkan SDM dan jiwa kewirausahaan kepada nasabah; (2) meningkatkan ekonomi mikro, dan (3) menjauhkan masyarakat dari praktik riba. *Kedua*, faktor pendukung secara internal BMT Al-Istiqamah adalah lokasi strategis, komitmen para Dewan Pendiri dan Pengurus, dan tingginya partisipasi simpanan anggota. Sedangkan secara eksternal adalah tingginya harapan para pelaku usaha mikro kepada BMT Al-Istiqamah, kemudahan mendapatkan bantuan modal, dan dukungan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh BMT Al-Istiqamah secara internal adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak BMT Al-Istiqamah yang baik secara tatakelola maupun teknis yang memahami konsep dan sistem ekonomi Syariah, adanya anggota/nasabah yang berhenti, dan kurangnya modal finansial yang dikelola oleh BMT Al-Istiqamah, dan masalah teknologi. Secara eksternal adalah adanya nasabah yang malas membayar simpanan dan minimnya bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memiliki implikasi yang sangat tinggi, yakni: (1) Menjadi motivasi bagi pihak BMT Al-Istiqamah dalam meningkatkan

peran strategisnya terhadap peningkatan ekonomi mikro di Enrekang secara umum. (2) Menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi pengurus BMT lain dalam meningkatkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. (3) Salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada BMT Al-Istiqamah bukan hanya dalam bentuk dukungan moril tetapi juga dalam dukungan tambahan modal usaha.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, disampaikan rekomendasi baik yang ditujukan kepada pengurus, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, dan para pelaku usaha mikro. Secara umum, rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kepada Pengurus BMT Al-Istiqamah agar lebih meningkatkan sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah tidak hanya yang beraktivitas ekonomi di dalam pasar sentral maupun di luar pasar. Dan melakukan kerjasama antar BMT untuk mendapatkan suntikan dana yang lebih besar yang bisa memberikan pinjaman modal yang lebih besar kepada pelaku usaha mikro. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang agar memberikan perhatian yang lebih besar sehingga dapat memberikan bantuan modal kepada pengurus BMT Al-Istiqamah. (3) Nasabah dan pelaku usaha mikro agar lebih meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan cara patuh pada setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh pengurus BMT Al-Istiqamah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Enrekang, pengurus, dan nasabah BMT Al-Istiqamah atas partisipasinya sebagai informan dalam penelitian ini. Semoga Allah swt memberi balasan terbaik atas semua kontribusi dan bantuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The Effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution. *Humanomics*, 31(2), 160–182.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2000). *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Ari, F. S. (2019). Business Model in Islamic Microfinance: Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) La Tansa Gontor. *Business Model in Islamic Microfinance: Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) La Tansa Gontor*.
- Ascarya, A., Rahmawati, S., & Tanjung, H. (2018). Design the roadmap of holistic financial inclusion for Baitul Maal wat Tamwil. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(1), 271288.
- Austhi, D. (2017). Motivasi berwirausaha dan kesuksesan berwirausaha pada wirausahawan wanita anne avanite. *Agora*, 5(1).
- Dang, G., Sui Pheng, L., Dang, G., & Sui Pheng, L. (2015). Theories of economic

- development. *Infrastructure Investments in Developing Economies: The Case of Vietnam*, 11–26.
- Dawami, Q., Razak, D. A., & Hamdan, H. (2021). Factors determining the successful performance of baitul maal wat tamwil in wonosobo. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(1), 79–100.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Edy, H. (2007). *Indahnya Ekonomi Islam*. Alfabeta.
- Hamriah. (2019). “Pedagang Beras.” *Wawancara*, Pasar Sentral Enrekang, 12 Desember 2019.
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, N. (2022). *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah.
- Imaniyati, N. S., & Bakti, P. T. C. A. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Citra Aditya Bakti.
- Lisa, O. (2016). Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(2), 44–51.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mursid, F. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(2), 9–30.
- Nasution, M. E. (2017). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nata, A. (2004). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nourma, D. (2017). Regulasi keberadaan baitul maal wat tamwil (bmt) dalam sistem perekonomian di indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 197–208.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2018). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Putra, P., & Isfandayani, I. (2020). Challenges in Management of Baitul Maal wa Tamwil Based on Waqf. *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)*, 562–565.

- Rahayu, N. S. (2020). The intersection of Islamic microfinance and women's empowerment: a case study of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 8(2), 37.
- Rifa'i, M., Suprihatin, S., & Agustim, W. (2019). Kompetensi Wirausaha, Pembinaan, Serta Lokasi Usaha Pengaruhnya Terhadap Kesuksesan Berwirausaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 2(2), 159–173.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusby, Z., & Hamzah, Z. (2013). Analysis problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) operation in Pekanbaru Indonesia using analytical network process (ANP) approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(8), 215.
- Sahil, I. (2019). Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 33–38.
- Soelton, M., Ramli, Y., Permana, D., Martawireja, A. E., Nurhayati, M., Saratian, E. T. P., & Arief, H. (2021). Increasing Smes Social Impact With Baitul Maal Wat Tamwil. *ICCD*, 3(1), 52–56.
- Subagiyo, R. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175–194.
- Suryana. (2003). *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Tabi, B. (2019). "Ketua Koperasi". *Wawancara*, Kantor KS BMT Al-Istiqamah Enrekang, 24 Novemver 2019.
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the Role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the Poor at the Bottom of the Economic Pyramid: Case Study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*.